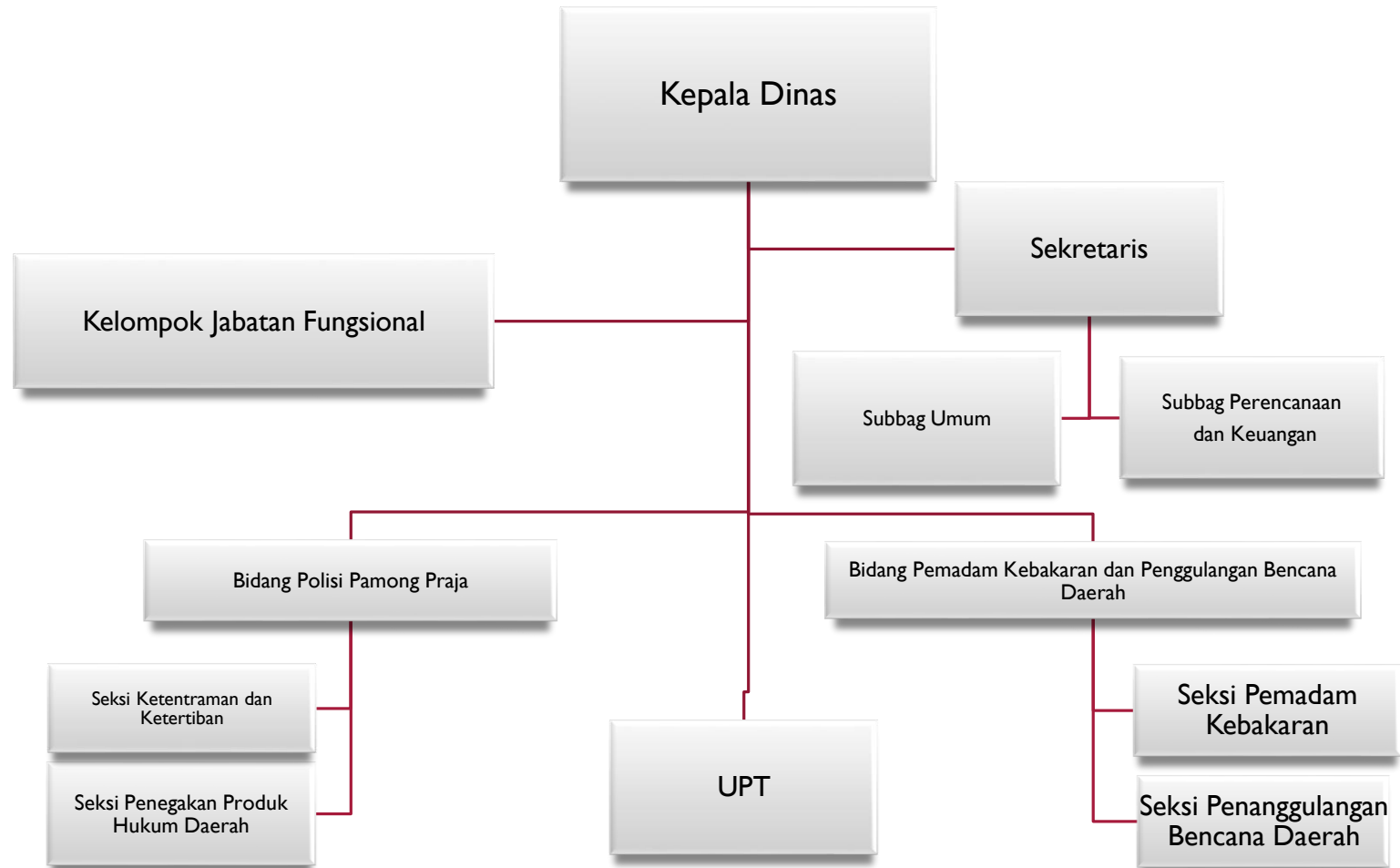


DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU

**DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAB. MAHAKAM ULU NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



TUGAS DAN FUNGSI DINAS

MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH

- DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
- BIDANG KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA;
- SERTA TUGAS PEMBANTUAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

*“ SALAH SATU URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR YANG
HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA ADALAH
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ”*

- DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU MAKA YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS MERUPAKAN URUSAN WAJIB;
- KARENA MERUPAKAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR MAKA DENGAN KATA LAIN TUGAS DAN FUNGSI DINAS INI SETARA DENGAN URUSAN WAJIB LAINNYA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, SERTA SOSIAL.



DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, HAL INI BENTUK IMPLEMENTASI DARI :

- AMANAH NAWA CITA YANG PERTAMA, YAITU “ MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN”

- SEBAGAI URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR MAKA MENTERI DALAM NEGERI MENGELUARKAN PERATURAN TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL YAITU
-

- PERMENDAGRI NOMOR 69 TAHUN 2012

PERMENDAGRI NOMOR 69 TAHUN 2012

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANTARA LAIN :

- CAKUPAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
- PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
- CAKUPAN RASIO PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
- CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN
- TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN
- PERSENTASE APARATUR PEMADAM KEBAKARAN YANG MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
- JUMLAH MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DIATAS 3000-5000 LITER

PROGRAM KERJA DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN :**
 - SOSIALISASI FORUM KEMITRAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT
 - TERBENTUKNYA TUGAS DAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 - KOORDINASI SAT LINMAS SE KABUPATEN MAHAKAM ULU
 - PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN TRANTIBUM DI MASYARAKAT
 - BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA SATLINMAS SE KABUPATEN MAHAKAM ULU

- **PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN :**

- MENGIKUTI HARI BAKTI SATPOL PP DAN LINMAS SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- BHAKTI SOSIAL SATPOL PP DAN LINMAS KABUPATEN MAHAKAM ULU
- UPACARA PERINGATAN HUT PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP DAN SATLINMAS

- **PROGRAM PEMELIHARAAN TRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KRIMINAL :**

- **PENYELENGGARAAN TRANTIBUMAS**

- PENGAMANAN PROTOKOLER DAN OBYEK VITAL
- PENGAMANAN ASET PEMERINTAH DAERAH
- PENGAMANAN KEGIATAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEJABAT NEGARA.
- PENERTIBAN NON YUSTISI / PERDA

- **OPERASIONAL TURJAWALI**

- OPERASIONAL PATROLI WILAYAH
- PENGAMANAN KANTOR DAN KEDIAMAN PEJABAT NEGARA

- **PROGRAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMILU / PEMILUKADA SE KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- PENDATAAN ANGGOTA SAT LINMAS SE KABUPATEN MAHAKAM ULU
- PENDATAAN TPS SEKABUPATEN MAHAKAM ULU
- PELATIHAN / BINTEK ANGGOTA SATLINMAS KABUPATEN MAHAKAM ULU
- MONITORING DAN PENGAWASAN PENGAMANAN PEMILU/PILKADA

- **PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAERAH**

- PENERTIBAN / RAZIA ASN DI LINGKUNGAN KABUPATEN
- PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PRODUK HUKUM DAERAH
- DIKLAT PPNS
- PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA/PRODUK HUKUM LAINNYA.
- PENYUSUNAN PROTAP / SOP SATPOL PP

- **PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- PELATIHAN FISK DAN MENTAL
- PELATIHAN DASAR SATPOL PP
- PELATIHAN TEKNIS

- **PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- PELATIHAN FISK DAN MENTAL

- PELATIHAN DASAR SATPOL PP

- PELATIHAN TEKNIS

- **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA**

- PENYUSUNAN PROFIL DAERAH RAWAN BENCANA

- FASILITASI POTENSI SAR KABUPATEN MAHAKAM ULU

- FASILITASI PENYELENGGARAAN BULAN PRB (PENGURANGAN RESIKO BENCANA)

- SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGULANGAN BENCANA DAERAH



- **PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**

- PEMBENTUKAN REGU/SATUAN SIAGA BENCANA
- PENYUSUNAN SOP KEBAKARAN & PENANGGULANGAN BENCANA
- TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM/ NON ALAM
- FASILITASI TIM PENANGGULANGAN BENCANA
- BIMBINGAN TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM & RESIKO LAINNYA

- **PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN**

- SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMADAM KEBAKARAN
- PELATIHAN SIAGA SATUAN TANGGUH BENCANA 5 KECAMATAN
- GLADI OPERASI PENANG
- PELATIHAN DAMKAR KABUPATEN MAHAKAM ULU GULANGAN BENCANA KEBAKARAN
- POS PELAYANAN SIAGA 24 JAM PMK KABUPATEN
- PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SATUAN DAMKAR PENANGGULANGAN

AMANAT MENTERI DALAM NEGERI :

- KONSEKUSI DARI URUSAN WAJIB YANG MENJADI DASAR PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH MAKA PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN PRIORITAS, MENYELENGGARAKAN URUSAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, MEMBERIKAN ALOKASI ANGGARAN YANG MEMADAI SERTA DIWADAI DALAM BENTUK DINAS YANG MANDIRI

TERIMA KASIH